Analisis Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)

Agung Suprianto ^{a*}, Soesilo Zauhar ^b, Bambang Santoso Haryono ^c

^{abc} Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 12 Juni 2019

Revisi pertama tanggal: 03 Juli 2019

Diterima tanggal: 31 Juli 2019

Tersedia online tanggal: 31 Agustus 2019

ABSTRACT

This research was conducted in Faculty of Administrative Sciences Brawijaya University with the aim to know the effectiveness of the procurement of goods and services, through the mechanism of e-procurement system. The results of this study found two findings. First, the process of procurement of goods/ services at the Faculty of Administrative Sciences Brawijaya University is in accordance with the regulations on procurement of government goods/ services, ranging from procedural analysis, related functions, up to the handling of information and documents in the e-procurement system. The research findings also suggest that a mechanism is needed to control the commitment of the winning bidder companies. Second, the e-procurement system in the procurement of goods/ services at the Faculty of Administrative Sciences Brawijaya University has been effective, although still experiencing the constraints of personnel composition within the Pokja is still dominated by personnel from the Faculty of Administration.

Keywords: *e-procurement, good/ services, mechanism*

INTISARI

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas pengadaan barang dan jasa, melalui mekanisme sistem *e-procurement*. Hasil penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, proses pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, mulai dari analisa prosedur, fungsi-fungsi yang terkait, sampai dengan penanganan informasi dan dokumen dalam sistem *e-procurement*. Temuan penelitian juga menyarankan diperlukan suatu mekanisme untuk mengontrol komitmen perusahaan pemenang lelang. Kedua, sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah efektif, walaupun masih mengalami kendala komposisi personil didalam Pokja tersebut masih didominasi oleh tenaga dari luar Fakultas Ilmu Administrasi.

2019 FIA UB. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: +62-813-3440-4906; e-mail: agungub@gmail.com

1. Pendahuluan

Proses pengadaan barang/ jasa pemerintah relatif berbeda dengan swasta. Perbedaan yang paling mendasar adalah dalam hal pembiayaannya. Seluruh pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik sebagian ataupun keseluruhan, harus mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang berlaku mulai 1 Januari 2011. Menurut Peraturan Presiden tersebut, pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengertian pengadaan barang/ jasa menurut Sutedi (2012:7), yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa.

Tujuan pengadaan barang atau jasa adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan proses yang berlaku atau dengan kata lain memperoleh barang dengan memenuhi kriteria 6 T, yaitu: tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, tepat prosedur, tepat jenis, dan tepat jumlah.

Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah terdapat prinsip-prinsip yang tidak tercakup dalam pengadaan barang/ jasa disektor swasta yang biasanya hanya menekankan pada sisi efisiensi dan efektifitas. Menurut Perpres 54/2010, prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/ Tidak diskriminatif, dan Akuntabel.

Pengadaan barang/ jasa secara konvensional memiliki beberapa kelemahan (LKPP, 2009), yaitu pengadaan barang secara arisan dan adanya *kickback* selama proses pengadaan, melakukan suap untuk memenangkan pengadaan, proses pengadaan yang tidak transparan, pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan, pemasok memasang harga yang

lebih tinggi (*mark-up*), memenangkan perusahaan kerabat, saudara atau kelompok tertentu, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya. Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada pengadaan barang/ jasa secara konvensional tersebut, menunjukkan bahwa masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi (Sutedi, 2012:138).

Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam proses pengadaan barang/ jasa secara konvensional, pemerintah telah mengeluarkan sebuah inovasi dalam pengadaan barang/ jasa disektor publik, yaitu *e-procurement*. Pentingnya *e-procurement* secara eksplisit dinyatakan oleh pemerintah sejak dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* (Reddick, 2004).

Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah secara konvensional. Oleh karena itu, pada Tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/ jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik, yaitu pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota wajib melakukan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-procurement*). *E-procurement* adalah sistem pengadaan barang/ jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Menurut Adinegoro dalam LKPP (2009:6); disebutkan bahwa pelaksanaan *e-procurement* merupakan transformasi mekanisme pengadaan nasional melalui lelang secara manual. Lelang manual sarat dengan berbagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan baik oleh oknum panitia lelang maupun oleh penyedia jasa, seperti timbulnya kondisi pasar pengadaan yang bersifat tertutup dan terkotak-kotak, sehingga pengadaan hanya bisa dilaksanakan oleh pengguna serta penyedia yang terbatas. Penerapan *e-procurement* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini memberikan banyak keuntungan baik dari sisi pengguna maupun sisi penyedia barang dan jasa.

Dari sisi pengguna, karena sifatnya yang tanpa batas, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas. Pengguna memiliki banyak pilihan serta mendapatkan penawaran yang lebih murah dengan kualitas lebih baik. Selain itu penerapan *e-procurement* mampu mengurangi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena sifatnya

yang antara lain transparan, konsisten, dan akuntabel. Dari sisi penyedia, banyak biaya yang bisa dihemat seperti biaya transportasi, akomodasi dan konsolidasi demikian pula biaya cetak dokumen bisa diminimalkan, sehingga penyedia dapat memiliki ruang yang cukup untuk melakukan optimasi penurunan nilai jual barang dan jasa mereka.

Pengukuran efektif atau tidaknya penerapan sistem *e-procurement* disebuah instansi pemerintah dapat dilihat dari ukuran indikator tujuan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah pada pasal 107, yaitu terdiri dari: (a) indikator meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (b) indikator meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (c) indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; (d) indikator mendukung proses monitoring dan audit; dan (e) indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya merupakan salah satu instansi perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Malang. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memiliki visi menjadi lembaga pendidikan ilmu administrasi yang bermutu dan diakui oleh masyarakat luas didalam dan diluar negeri. Misi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya adalah a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b) Menciptakan etos ilmu administrasi di tengah masyarakat dan memperkuat posisi alumni di tengah pasar kerja; dan c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen dan pengelolaan fakultas.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melaksanakan berbagai macam kegiatan, dimana salah satunya melaksanakan proses pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa setiap tahunnya. Pengadaan barang dan jasa di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mulai dari pengadaan alat tulis kantor, peralatan dan mesin, jasa konsultasi, sampai pengadaan konstruksi (bangunan gedung). Dalam mencapai proses pengadaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa pemerintah yang meliputi efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel, maka Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya telah menerapkan sistem pengadaan secara *e-procurement* dimana proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web.

Berdasarkan uraian tentang sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah tersebut diatas; maka rumusan penelitian ini adalah: a) Bagaimana pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam

pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya?; dan b) Bagaimana efektifitas pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya?.

2. Teori

2.1 Pengadaan Barang/ Jasa

Definisi pengadaan barang/ jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/ jasa. Disinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang/ jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang/ jasa tersebut.

Kartikasari (2007) melaksanakan penelitian dengan judul "Pengaruh *E-procurement* terhadap Pengadaan Barang Pada Bagian Perlengkapan". Lokasi penelitiannya di Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan *e-procurement* terhadap pengadaan barang, selain itu juga terdapat hubungan indikator *e-procurement*, yaitu transparansi, efektifitas, dan efisiensi terhadap pengadaan barang.

Damayanti & Hamzah (2017) melaksanakan penelitian dengan judul "Pengaruh *E-Procurement* terhadap *Good Governance*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara parsial dengan variabel efisiensi dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap *good governance*, sedangkan efektif, daya saing dan tanggung jawab tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *good governance*.

Hapiah (2011) melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement Government*) di Provinsi Jawa Barat". Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diambil adalah bahwa kondisi implementasi kebijakan *e-procurement* di Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara efektif tapi terlihat belum optimal.

Andriyani (2012) melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Hasil penelitian adalah bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa belum memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi adanya pelanggaran tetapi dengan adanya *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan.

Sari (2013) melaksanakan penelitian dengan judul “Evaluasi *E-Procurement* dalam Sistem Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Kota Surabaya”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan *E-Procurement* dalam sistem pengadaan barang/ jasa mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Pelaksanaan *E-Procurement* mempunyai faktor pendukung, yakni server, kapasitas server, serta lingkungan *E-Procurement*. Faktor penghambat *E-Procurement* diantaranya adalah penyedia barang dan jasa masih banyak yang belum memahami alur sistem *full* elektronik.

Novitaningrum (2014) melaksanakan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *Electronic Procurement* (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya melalui *e-procurement* telah berhasil diwujudkan.

Suprayitno (2014) melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung”. Hasil penelitian dengan menggunakan statistik *moment product* menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara pengawasan dengan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Putra et al., (2015) melaksanakan penelitian dengan judul “Efektifitas Pengadaan Barang/ Jasa Melalui *E-Procurement* pada Pemerintah Kota Sungai Penuh”. Hasilnya bahwa pelaksanaan *e-procurement* hanya baru berdampak pada efektifitas pengadaan barang dan jasa sebesar 57.14%, sementara efektif tidaknya pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Kota Sungai Penuh dipengaruhi oleh tiga faktor *e-procurement*, yaitu faktor “Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Sanggah” dengan tingkat signifikan paling besar ($t=0.58$), kemudian urutan kedua Faktor “Pelaksanaan Standar Akuntabilitas Lelang” ($t=0.57$) dan ketiga Faktor Ketepatan Waktu Pelaksanaan Lelang ($t=0.29$).

2.2 Metode Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang tercantum dalam Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012; penetapan metode pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri dari: a) Kontes, b) Sayembara, c) Penunjukan Langsung, d) Pengadaan Langsung, e) Pemilihan Langsung, f) Seleksi sederhana, g) Pelelangan Sederhana, h) Pelelangan Terbatas, i) Seleksi Umum, dan j) Pelelangan Umum.

2.3 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA dan KPA);
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); dan
- Penyedia Barang dan/ atau Jasa (Rekanan/ Kontraktor).

2.4 *E-Procurement*

Menurut Indrajit & Djokopranoto (2003) “*E-Procurement* adalah pembelian yang dilakukan dengan menggunakan internet”. *E-procurement* menurut Sutedi (2012:254) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dari Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007:218) bahwa *e-procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/ lelang pengadaan barang/ jasa pemerintah berbantuan internet.

Definisi lebih sederhana disampaikan oleh Andrianto (2007:215), bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik. Sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa bertujuan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektifitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/ jasa melalui media elektronik antara panitia dan penyedia jasa.

Secara umum, *e-procurement* dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *e-Tendering* dan *e-Purchasing* (LKPP):

- E-Tendering* adalah proses pengadaan barang/ jasa yang diikuti oleh penyedia barang/ jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran. *E-Tendering* sama persis dengan proses pengadaan barang/ jasa yang selama ini dilaksanakan secara manual, namun perbedaannya adalah pada tahapannya yang dilakukan secara elektronik; dan
- E-Purchasing* adalah proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik. *E-Purchasing* melalui proses yang berbeda dengan proses yang dilaksanakan selama ini. Pengguna barang/ jasa cukup hanya memilih barang/ jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka dan transparan. Sistem katalog elektronik sekurang-

kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/ jasa. Katalog ini disusun oleh LKPP melalui sebuah kontrak payung kepada produsen atau penyedia utama, sehingga harga yang ditawarkan pun jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran. *E-purchasing* diselenggarakan dengan tujuan, yaitu sebagai berikut:

- Terciptanya proses pemilihan barang/ jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/ Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/ jasa pada pilihan terbaik; dan
- Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/ jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.

Secara umum, tujuan dari diterapkannya *e-procurement*, yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. *E-procurement* dapat memperbaiki tingkat layanan kepada para *user*, mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan, memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*, serta mendukung proses monitoring dan audit. Dari penerapan *e-procurement*, manfaat yang dapat diperoleh antara lain sebagai berikut:

- a) Keuntungan langsung: meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi, mengurangi biaya operasi, dan mengurangi *supply cost*; dan
- b) Keuntungan tidak langsung: membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan layanan kepada konsumen, meningkatkan hubungan mitra kerja, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses, dan dokumentasi.

2.5 Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa

Efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi ataupun program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk melihat pengukuran efektif atau tidak penerapan sistem *e-procurement* disebuah instansi pemerintah dapat dilihat dari ukuran indikator tujuan yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada pasal 107, yaitu terdiri dari:

- a) Indikator meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b) Indikator meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c) Indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;

- d) Indikator mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e) Indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Berdasarkan kriteria pengukuran efektivitas penerapan sistem *e-procurement* diatas, dapat disimpulkan bahwa model yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan model pengukuran efektivitas yang multivariasi (Steers, 1977), yaitu meliputi: (a) ukuran transparansi dan akuntabilitas; (b) ukuran akses pasar dan persaingan usaha; (c) ukuran efisiensi; (d) ukuran proses monitoring dan audit; dan (e) ukuran kebutuhan akses informasi.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari langsung sistem pengadaan barang/ jasa yang terjadi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Fokus dalam penelitian ini adalah: a) Pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya; dan b) Efektivitas pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu: a) Wawancara, dan b) Dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi, pengumpulan data mengenai seluruh dokumen yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/ jasa, berupa formulir-formulir, dan nota dinas yang ada. Alat bantu yang dipergunakan adalah alat tulis baik manual maupun mesin.

Setelah dilakukannya kegiatan pengumpulan data, maka selanjutnya adalah analisa data. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a) Menganalisis pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa yang ada pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sistem pengadaan barang/ jasa yang akan dianalisis adalah:
 - Analisis prosedur;
 - Analisis fungsi yang terkait; dan
 - Analisis informasi dan dokumen yang digunakan.
- b) Menganalisis efektivitas pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa yang ada pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Indikator yang digunakan dalam analisis efektivitas pelaksanaan sistem *e-procurement*, terdiri dari:

- Indikator meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - Indikator meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
 - Indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
 - Indikator mendukung proses monitoring dan audit; dan
 - Indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.
- c) Memberi kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dan memberikan saran terhadap sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Efektivitas Pelaksanaan Sistem E-Procurement pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

4.1.1 Indikator Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/ jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. *Akuntable*, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya telah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan melalui elektronik, informasi terkait proses pengadaan barang/ jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh pihak yang berkepentingan, yaitu ULP, LPSE, auditor, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan masyarakat atau kalangan umum.

Azas transparansi dan akuntabilitas yang terdapat pada pelelangan dengan sistem *e-procurement* yang menggunakan SPSE di ULP Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, diantaranya:

- a) Sampai dengan batas pemasukan dokumen/ penawaran, semua pokja, PPK, LPSE atau siapapun tidak bisa mengetahui siapa peserta pelelangan/ seleksi, sehingga pengaturan pelelangan/ seleksi tidak terjadi;
- b) Pelaksanaan *e-procurement* dijalankan dengan sistem yang harus dipenuhi dalam setiap tahapannya, bila tidak bisa dipenuhi, tidak akan berpindah ke tahapan selanjutnya;
- c) Pokja ULP Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atau siapapun tidak bisa merubah atau menambah data penawaran penyedia yang ada disistem SPSE, sehingga bila ada keraguan proses,

pemeriksa bisa melihat dokumen-dokumen yang tersimpan dalam sistem; dan

d) Data yang masuk disistem SPSE terkunci dengan sistem lembaga sandi negara.

E-procurement merupakan alat untuk menjembatani hubungan antara penyedia barang dan jasa dengan pengguna barang dan jasa dimana pengguna dapat mengakses informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa secara *online*. Adanya sistem *e-procurement*, seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan segala kegiatannya baik secara vertikal maupun horizontal.

E-procurement yang ditunjang oleh teknologi informasi yang canggih, mampu meng-cover seluruh berkas, dokumen, dan data-data yang berkaitan dengan *e-procurement* secara rapi dan aman. Jadi, ketika suatu saat pihak panitia dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan pengadaan yang ada, baik berupa laporan penggunaan anggaran, seluruhnya dapat dipenuhi secara tepat. Dengan demikian, proses transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dengan mudah dikelola dan diawasi.

4.1.2 Indikator Meningkatkan Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat

Penerapan *e-procurement* dapat meningkatkan akses pasar, dimana hal ini berarti pengadaan barang/ jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Selain itu *e-procurement* juga dapat meningkatkan persaingan usaha yang sehat, yang berarti pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ jasa.

Upaya yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dalam meningkatkan persaingan usaha yang sehat dengan *e-procurement* adalah mengikuti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diciptakan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi persekongkolan dan mempengaruhi panitia pengadaan.

E-procurement memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik). Teknologi memungkinkan penyedia barang/ jasa pemerintah disebuah daerah, dengan hanya sekali mendaftarkan diri, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, yaitu dalam hal ini seluruh Indonesia, untuk

kemudian melakukan persaingan secara sehat dan terbuka. Pengusaha besar dan pengusaha kecil mendapatkan informasi peluang pasar yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenangkan peluang tersebut dan nyaman. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya.

4.1.3 Indikator Memperbaiki Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan

Efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) bagi pemerintah diharapkan juga memberikan efisiensi yaitu dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek.

Pada dasarnya, penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya telah mendapatkan manfaat mengenai efisiensi proses Pengadaan. Hal ini dikarenakan bahwa dengan *e-procurement*, panitia maupun calon penyedia barang/ jasa dapat menghemat biaya dan waktu. Selain itu juga, *e-procurement* telah mempersingkat proses pengadaan, yaitu tidak dapat dilakukan tatap muka antara panitia dengan calon penyedia barang/ jasa dalam proses pengadaan barang/ jasa.

4.1.4 Indikator Mendukung Proses Monitoring dan Audit

Berdasarkan hasil penelitian di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, tujuan *e-procurement* untuk mendukung proses monitoring dan audit adalah tercapai. Hal ini ditandai bahwa semua data mengenai pengadaan barang/ jasa atau biasa disebut lelang, akan tersimpan terus dalam Sistem Pengadaan Barang/ Jasa (SPSE) dan *website*, sehingga memudahkan KPK, BPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), dan BPKP untuk mengawasi dan memeriksa pengadaan barang/ jasa atau lelang.

LKPP mengembangkan Sistem Audit yang akan menjadi alat bagi auditor dalam memeriksa proses pengadaan. Sistem ini memberikan rincian informasi terkait aktivitas disetiap tahapan proses pengadaan. Sistem ini dapat diakses *online* oleh seorang auditor dari manapun dan kapanpun selama masih terhubung dengan Internet. Adanya fasilitas audit dalam *e-procurement* akan memastikan kecukupan pengendalian intern di

dalam sistem *e-procurement* dan juga memastikan bahwa proses pengadaan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Dari sisi BPKP sendiri, Sistem Audit dalam aplikasi *e-procurement* merupakan perwujudan konsep *e-Audit* yang merupakan bagian dari Kerangka Pengembangan Sistem Informasi BPKP (BPKP Enterprise System-BEST). *E-Audit* masuk dalam kategori aplikasi lanjutan yang diharapkan dapat membantu seorang auditor dalam melakukan kegiatan auditing secara elektronik.

4.1.5 Indikator Memenuhi Kebutuhan Akses Informasi yang Real Time

Sesuai hasil penelitian di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, tujuan *e-procurement* untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* adalah telah tercapai. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan *e-procurement*, informasi mengenai pengadaan barang/ jasa dapat diperoleh kapanpun informasi tersebut diperlukan, dan tidak perlu untuk menunggu untuk kemudian hari. Pihak manapun tersebut, dengan mudah dapat mengakses kapanpun dengan melalui media internet.

E-procurement juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Jika dimasa lalu, pelaku usaha perlu sering mendatangi instansi pemerintah di masing-masing sektor dan mendekati pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan, maka kini informasi tersebut telah tersedia dalam sistem.

4.2 Pembahasan

a) Hasil penelitian tentang pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, mulai dari analisa prosedur, fungsi-fungsi yang terkait, sampai dengan penanganan informasi dan dokumen dalam sistem *e-procurement*. Namun pada saat pelaksanaan pekerjaan dilapangan, tidak jarang masih terdapat sedikit ketidaksesuaian kualifikasi yang telah dipersyaratkan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, yang memaparkan bahwa:

“Pada waktu penilaian teknis Dokumen Penawaran sebuah perusahaan pemenang lelang adalah sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, mulai dari daftar peralatan utama sampai daftar personil inti yang diperlukan. Namun, pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tidak jarang kualifikasinya menjadi tidak sesuai, misalnya Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk Pengawas (minimal S1 Teknik Sipil), tetapi

kenyataan di lapangan masih berpendidikan STM. Hal ini menjadi perhatian sekaligus catatan dalam proses pengadaan barang/ jasa” (Selasa, 06 Februari 2018: 10.25 WIB).

- b) Berdasarkan kenyataan seperti tersebut diatas, maka diperlukan sebuah mekanisme untuk mengontrol komitmen perusahaan pemenang lelang, agar tetap konsisten dengan kualifikasi yang tertulis didalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran selama pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Dengan demikian, hasil akhir pengadaan barang/ jasa bisa optimal sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja.
- c) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah efektif, dimana tercermin pada tercapainya lima indikator efektivitas, yaitu: (a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (b) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (c) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; (d) Mendukung proses monitoring dan audit; dan (e) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Hasil penelitian di Kelompok Kerja ULP Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya juga menunjukkan bahwa komposisi personel didalam Pokja tersebut masih didominasi oleh tenaga dari luar Fakultas Ilmu Administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Fakultas Ilmu Administrasi masih sedikit yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, perlu diadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/ jasa secara rutin, sehingga dapat meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang handal dan profesional didalam proses *e-procurement*.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Analisa pelaksanaan sistem *e-procurement* ini dimulai dari analisa prosedur, fungsi-fungsi yang terkait, sampai dengan penanganan informasi dan dokumen dalam sistem *e-procurement*; dan
- b) Pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah efektif. Hal ini tercermin pada telah tercapainya lima indikator efektivitas sistem *e-procurement*, yaitu:

- Indikator meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- Indikator meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- Indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- Indikator mendukung proses monitoring dan audit; dan
- Indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Nico. (2007). *Good E-government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Andriyani, Susan. (2012). Analisis Efektivitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Damayanti, Astri, & Hamzah, Ardi. (2017). *Pengaruh E-procurement Terhadap Good Governance*. Tersedia pada [https://www.academia.edu/34104665/Pengaruh_E-Procurement Terhadap Good Governance](https://www.academia.edu/34104665/Pengaruh_E-Procurement_Terdapat_Good_Governance) [Diakses pada 27 Mei 2017].
- Departemen Pendidikan RI. (2005). *Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hapiah, Yuli. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement Government*) di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume VIII, No. 1 (Maret), pp.49-67.
- Indrajit, Richardus Eko., & Djokopranoto, Richardus. (2003). *Dasar, Prinsip, Teknik, dan Potensi Pengembangan E-Procurement*. Dinastindo, Jakarta.
- Kartikasari. (2007). *Pengaruh e-procurement terhadap Pengadaan Barang pada Bagian Perlengkapan*. Surabaya: Univ. Bhayangkara.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta: LKPP.
- Novitaningrum, Badzlina Daroyani. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *Electronic Procurement (Best Practice* di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 2, Nomor 1, pp.13-22.
- Putra, Inlahadi., Nasfryzal Carlo., & Nursyaifi Yulius. (2015). Efektifitas Pengadaan Barang/ Jasa Melalui *E-Procurement* pada Pemerintah Kota

Sungai Penuh. Tersedia pada <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JPSC2&page=article&op=view&path%5B%5D=6096&path%5B%5D=5149> [Diakses pada 10 Maret 2018].

- Reddick, C. G. (2004). The Growth of E-Procurement in American State Governments: A Model and Empirical Evidence. *Journal of Public Procurement*, Vol. 4, No. 2, pp.151-176.
- Sari, Sherlya Ayu Nidya. (2013). Evaluasi Electronic-Procurement dalam Sistem Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Kota Surabaya. *Skripsi*, Universitas Negeri Surabaya.
- Steers, Richard M. (1977). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
- Suprayitno, M. (2014). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume XI, Nomor 1, pp.161-182.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya* - Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika.